

Dinamika Domestik dalam Kebijakan Luar Negeri: Mundurnya India dari *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)

Noudy Naufal dan Shofwan Al-Banna Choiruzzad
Universitas Indonesia

Abstrak

Keputusan India untuk mengundurkan diri dari perjanjian perdagangan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) menjadi kebijakan yang mengejutkan dalam perdagangan internasional yang menghambat agenda regionalisme India dan keinginannya untuk mendekat kepada kawasan India Timur. Tulisan ini mencoba untuk mencari penyebab mundurnya India dari RCEP dengan menunjukkan bahwa tekanan domestik menjadi faktor utama yang mendorong India untuk menarik diri dari RCEP. Melalui penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konsep yang disusun oleh Thomas Risse-Kappen tentang penggolongan aktor-aktor domestik penentu dalam dinamika kebijakan luar negeri suatu negara, melalui sistem politik serta kelompok masyarakat dalam memahami pengaruh aktor-aktor domestik formulasi kebijakan luar negeri India. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa selain perekonomian India yang tidak diuntungkan dengan RCEP, tekanan domestik dari aktor-aktor kelompok nasionalis Hindu seperti *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS) menjadi pendorong kuat terhadap mundurnya India dari perundingan RCEP.

Kata kunci: Kebijakan Luar Negeri; Nasionalisme Hindu; Pengaruh Domestik; Perdagangan Internasional

India's decision to withdraw from Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) has been one of the shocking event in the international trade, resulting in obstruction of India's regionalist agenda and its attempt to look towards its eastern neighbours. This paper will attempt to explain India's withdrawal from RCEP negotiation by looking at domestic factors by arguing that domestic pressures are the main factors for India withdrawal from RCEP. In this research, the author will use conceptual framework developed by Thomas Risse-Kappen to classify the influences of domestic actors on foreign policy, based on its political system and societal groups to understand how the domestic actors influences Indian foreign policy. This research also shows that apart from the perceptions that the country's membership in the RCEP doesn't benefit their economic interests, pressures from the Hindu nationalist groups, especially from Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) has been one of the major domestic pressures on India's withdrawal from RCEP's negotiation rounds.

Keywords: Foreign Policy; Hindu Nationalism; Domestic Influences; Internatational Trade

Pendahuluan

Regionalisme merupakan salah satu kajian utama yang cukup signifikan dalam kajian ilmu hubungan internasional dalam memahami keterkaitan ekonomi, perdagangan dan keuangan dalam suatu kawasan tertentu. Salah satu upaya dari Regionalisme ekonomi yang dicoba dibangun dalam kawasan Asia-Pasifik adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* yang mencoba untuk menghubungkan berbagai perekonomian antar negara di kawasan Asia-Pasifik. Secara umum, RCEP merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas (FTA) antar negara-negara di Asia Timur yang terdiri atas negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru. Pada dasarnya, perjanjian RCEP mencoba untuk mengakselerasi keterkaitan ekonomi, nilai perdagangan dan investasi yang diharapkan akan mendorong aktivitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kawasan, terutama terhadap negara-negara berkembang.

Akan tetapi pada akhir tahun 2019, India menyatakan keluar dari rangkaian negosiasi penyusunan RCEP yang telah disusun selama kurang lebih tujuh tahun. Pada konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN ke-22 di Bangkok pada 5 November 2019, India di bawah pemerintahan Narendra Modi menarik diri dari negosiasi RCEP yang dianggap merugikan kepentingan dalam negeri di India (The Economic Times 2019a). Beberapa poin keberatan yang dianggap merugikan pihak dari India antara lain adalah: (1) untuk mempromosikan gerakan 'Make in India' sebagai usaha mempromosikan industri dalam negerinya; (2) kekhawatiran akan neraca defisit dalam perdagangan oleh Tiongkok; serta (3) tekanan dari dalam negeri untuk melindungi industri domestiknya dalam sektor pertanian dan manufaktur. Meskipun mundurnya India dari perundingan RCEP ini cukup mengejutkan berbagai negara yang terlibat dalamnya, India akan tetap membuka diri dalam negosiasi penyusunan RCEP yang diharapkan akan mewakili kepentingan nasional India dalam membangun kawasan perdagangan bebas di seluruh Asia-Pasifik.

Naiknya Tiongkok sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian global memunculkan kekhawatiran bagi India yang berniat kembali menempuh kebijakan pembangunan yang bersifat Proteksionisme, sehingga terdapat inkonsistensi kebijakan pemerintahan India di bawah Modi untuk mengintegrasikan negaranya ke dalam perekonomian global. Hal tersebut dipahami menjadi dasar utama bagi pengusaha-pengusaha India yang khawatir akan banjirnya barang-barang murah dari Tiongkok, terutama bagi perusahaan-perusahaan manufaktur yang

mengimpor barang mentah dari Tiongkok dan menganggap RCEP sebagai kesepakatan bilateral antara India dan Tiongkok (Sharma 2019). Akan tetapi, Regionalisme dalam kebijakan perdagangan India melalui berbagai FTA turut berpengaruh, yang dalam tingkatan tertentu menghasilkan defisit neraca perdagangan yang lebih besar, pada kinerja ekspor dan impor India.

Sebelum reformasi ekonomi yang dilakukan oleh India setelah krisis keuangan pada tahun 1991, kebijakan ekonomi India cenderung bersifat tertutup dengan tingkat tarif yang tinggi, mata uang yang tidak dapat ditukar secara internasional, dan sentralisasi pembangunan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan luar memerlukan lisensi khusus dari pemerintah pusat. Pola pembangunan di India sebelum liberalisasi pasar cenderung menerapkan model substitusi impor. Meskipun badan usaha milik pemerintah mencakup 39 persen dari jumlah investasi di India, kontribusinya hanya 14 persen dari total PDB dalam kurun tahun 1986 hingga 1991. Di bawah perdana menteri P. V. Narasimha Rao, pertumbuhan ekonomi India mulai meningkat pesat dibandingkan dengan reformasi Tiongkok di bawah Deng Xiaoping sebelum akhirnya melambat pada dekade 2010-an (Aiyar 2016).

Secara logis, liberalisasi ekonomi akan mendorong suatu negara untuk mengintegrasikan perekonomiannya serta hubungan perdagangannya dengan dunia internasional, termasuk India melalui keterlibatannya dalam institusi-institusi internasional seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *World Trade Agreement* (WTO). Masuknya India dalam kesepakatan-kesepakatan antar negara serta respons dan strategi India dalam meneruskan reformasi tersebut dipahami menjadi usaha liberalisasi India. Tampak bahwa pertentangan dari India juga dikemukakan baik dari pihak partai oposisi (*Indian National Congress* – INC yang diketuai oleh Sonia Gandhi), maupun dari para pengusaha pertanian dan konglomerasi industri (Dasgupta 2020a). Selain itu, keluarnya India dari RCEP juga dapat dipandang bertolak belakang dari kebijakan ‘*Act East Policy*’ India yang dianggap mendapat tantangan berat untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Tenggara serta seluruh Asia Pasifik (Mishra 2019). Selain itu, mundurnya India dari negosiasi RCEP ini dianggap sebagai suatu peluang yang hilang untuk semakin mendekat menuju kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan menyusul diperbaharukannya kerja sama ASEAN dan Tiongkok dari yang bersifat dua arah menjadi mencakup seluruh pilar ASEAN – ekonomi, keamanan dan sosial-budaya (Bhadrakumar 2019). Dalam hal ini, keluarnya India dari RCEP dapat dilihat sebagai suatu keputusan mengejutkan yang dapat dilihat untuk

melindungi industri dalam negerinya setelah bertahun-tahun melakukan liberalisasi perekonomiannya ke dalam tatanan ekonomi internasional.

Mundurnya India dari RCEP memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan perdagangan India menyusul telah adanya beragam FTA yang melibatkan India. Selain itu, tampak bahwa India mencoba untuk memajukan kepentingan domestik dan dalam negerinya sebagai *rationale* untuk melindungi industri dalam negerinya yang cenderung negerinya yang cenderung mencerminkan kembali logika Proteksionisme di tengah integrasi perekonomian global melalui berbagai FTAs, terutama mengenai hubungan India dengan ASEAN dan Asia-Pasifik secara keseluruhan. Munculnya berbagai tekanan domestik turut memunculkan peranan aktor-aktor domestik dalam penyusunan kebijakan luar negeri India, terutama dalam sektor perdagangan dan perekonomian. Berdasarkan rangkuman dari perumusan permasalahan tersebut, maka pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini ialah *'bagaimana dinamika aktor-aktor domestik memengaruhi mundurnya India dari perundingan RCEP?'*

Tinjauan Teoretis

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kerangka konsep yang diambil dari analisis struktur domestik dalam kebijakan luar negeri yang ditulis oleh Thomas Risse-Kappen yang berjudul *Public Opinion, Domestic Structure, and Foreign Policy in Liberal Democracies*. Secara umum, tulisan ini dan karya Thomas Risse-Kappen mencoba untuk mengkaji hubungan dan pengaruh dari dinamika domestik terhadap kebijakan luar negeri suatu negara serta keterkaitannya pada lingkungan internasional secara umum. Tulisan Risse-Kappen lebih melihat pada keseluruhan struktur domestik serta pembentukan opini publik dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam hal ini, ia melihat terdapat celah mengenai analisis domestik dalam kebijakan luar negeri suatu negara yang kurang mampu dijelaskan oleh pendekatan *bottom-up* dan *top-down*. Di sini muncul celah perbedaan dalam menjelaskan mengenai peran domestik pada kebijakan luar negeri antar negara karena baik publik maupun elit dalam arena internasional tidak mampu menjelaskan perbedaan kepentingan dari negara-negara.

Untuk mengisi celah tersebut, Risse-Kappen (1991) mencoba untuk melihat struktur domestik (*domestic structures*) dan *coalition-building process* dalam memahami peran dalam negeri pada kebijakan luar negeri suatu negara. Umumnya terdapat tiga faktor utama dalam menganalisis bagaimana dinamika domestik dapat memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara: (1) peran institusi politik dan pemerintahan pada ranah

eksekutif suatu negara (terutama dalam ranah birokrasi eksekutif negara); (2) analisis struktur masyarakat dalam memahami polarisasi serta perbedaan kepentingan dalam masyarakat suatu negara; dan (3) proses *coalition-building* yang mampu menghubungkan antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*). Dalam konsepnya ini Risse-Kappen mencoba untuk fokus pada dinamika proses *coalition-building* yang terbagi dalam tiga penggolongan utama: (1) *state-dominated* – umum terjadi dalam terjadi dalam negara-negara yang memiliki institusi-institusi politik dan pemerintahan terpusat (*centralized*) dengan opini masyarakat yang cenderung terbelah (*polarized*) serta organisasi masyarakat yang cenderung lemah; (2) *societal control* – umum terjadi dalam negara-negara dengan masyarakat yang lebih bersifat homogen dengan struktur institusi negara yang cenderung lemah; dan (3) *democratic corporatism* – umum terjadi dalam negara-negara dengan kekuatan antara negara dan masyarakat yang cenderung berimbang, sehingga memungkinkan untuk mengambil kebijakan yang merefleksikan titik denominasi utama dari opini masyarakat secara umum. Penelitian ini akan mencoba untuk menggunakan data-data sekunder mengenai dinamika domestik di India, namun konsep ini terlalu berfokus pada variabel tersebut yang mendorong penelitian ini untuk menggunakan konsep kedua dalam subjek penelitian ini.

Metode Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan lebih bersifat sekunder seperti analisis pustaka dan dokumen dengan data primer yang akan diambil dari wawancara oleh pihak yang terkait dengan negosiasi India dalam RCEP. Penelitian kualitatif secara garis besar mencoba untuk melakukan pendekatan berdasarkan kajian tekstual dibandingkan dengan penelitian kuantitatif yang cenderung mengukur fenomena sosial secara deduktif dan objektif dengan mengukur data-data objektif secara sosial. Terdapat tiga karakteristik utama dalam penelitian kualitatif (Bryman 2004) secara umum: (1) cenderung bersifat induktif dengan mencoba untuk mencari generalisasi teori; (2) cenderung bersifat interpretif yang berbeda dari logika positivistik secara epistemologi; dan (3) cenderung bersifat konstruktif dengan objek penelitian merupakan konstruksi dari aktor-aktor sosial yang terlibat. Kemudian, penelitian ini secara mayoritas akan menggunakan analisis data sekunder serta data primer dalam mengkaji mengenai dinamika aktor-aktor domestik pada suatu negara di India terhadap negosiasi RCEP ini. Secara umum, terdapat dua jenis data sekunder dalam sebuah penelitian sosial menurut Alan Bryman (2004) yaitu data dan hasil

penelitian yang dikeluarkan oleh peneliti lain serta data dan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh beragam institusi baik pemerintah maupun swasta.

Hasil Penelitian

Hubungan India dan ASEAN

Salah satu hal yang penting dalam memahami hubungan India dengan ASEAN dalam kerangka *Look East* dan *Act East* yaitu untuk memahami konsep sentralitas ASEAN (*ASEAN Centrality*) dalam kebijakan India terhadap Asia-Pasifik. Secara umum, gagasan mengenai ASEAN *Centrality* lebih bersifat strategis dibandingkan dengan ekonomi. Hal tersebut terlihat melalui pertemuan East Asia Summit (EAS) pada bulan Juli 2010 dengan negara-negara yang terlibat (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Rusia) agar keterlibatan ASEAN dapat sejajar dengan anggota-anggota dalam pertemuan EAS tersebut (The Nation Thailand 2011). Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa hubungan antara India dengan negara-negara di Asia Tenggara (terutama terhadap ASEAN) tidak selalu berjalan mulus.

Peran India yang kurang signifikan dalam kawasan Asia Tenggara jika dibandingkan dengan Jepang dan Tiongkok serta fokus geografis terhadap kawasan Indochina (Myanmar, Kamboja, Thailand, Laos dan Vietnam) dapat dipahami menggambarkan dinamika kebijakan India yang cenderung sempit di kawasan tersebut. Meskipun terdapat upaya dan inisiatif dari India untuk menghubungkan negara tersebut terhadap ASEAN, namun hubungan khusus India dengan Vietnam (mengacu pada konteks Perang Dingin) serta dukungan India terhadap pemerintahan Heng Samrin pada konflik Kamboja pada tahun 1980 sempat menghambat upaya pendekatan India terhadap kawasan Asia Tenggara secara lebih jauh (Sridharan 1997). Di sini dapat dipahami terdapat *missing opportunity* dari India untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan Asia Tenggara di tengah liberalisasi ekonomi yang tengah didorong dalam negara tersebut pada era pemerintahan Rajiv Gandhi pada dekade 1980-an. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran bahwa secara politik, India akan terjebak dalam dinamika *power politics* antara negara-negara Asia-Pasifik lainnya terutama Jepang dan Tiongkok.

Secara umum, fokus hubungan ASEAN pada dekade 1990-an dan 2000-an lebih didorong oleh keterkaitan antara kawasan Asia Tenggara terhadap naiknya Tiongkok, hubungan ekonomi yang erat dengan Jepang, serta keterlibatan Amerika Serikat yang cukup intensif di Asia Tenggara.

Keterlibatan India yang semakin dalam pada ASEAN tidak hanya melalui inisiatif yang datang dari pemerintah India itu sendiri, secara implisit dipengaruhi dorongan Jepang (serta Singapura dan Indonesia) untuk melibatkan India, Selandia Baru dan Australia dalam kerangka ASEAN+6 yang berlanjut pada East Asia Summit pada bulan Desember 2005 menunjukkan terdapat kekhawatiran bersama untuk membendung Tiongkok baik secara keamanan maupun ekonomi (Koo 2012). Akan tetapi, meskipun Amerika Serikat cenderung untuk tetap terlibat dalam mekanisme keamanan pada kawasan Asia-Pasifik, tidak dilibatkannya Amerika Serikat dalam penyusunan kawasan perdagangan bebas serta berkurangnya prestise Amerika Serikat dalam tata kelola ekonomi global menyusul krisis keuangan 2008 yang berakibat pada penguatan Tiongkok mendorong fokus utama dalam Regionalisme di kawasan Asia-Pasifik untuk melebarkan pokok pembahasan dari liberalisasi perdagangan untuk melingkupi juga kerja sama finansial baik dalam ASEAN+6, ASEAN+8, dan East Asia Summit (yang merupakan perpanjangan tangan dan perkembangan dari ASEAN+8).

Keterkaitan antara India dengan Asia Tenggara tersebut yang didorong oleh penguatan perdagangan antara keduanya mendorong adanya inisiatif untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan membangun FTA secara spesifik yang dimaksudkan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi baik antara India maupun pada kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Telah terdapat berbagai pembahasan mengenai penyusunan FTA regional antara India dengan ASEAN yang secara umum dibahas pada berbagai pertemuan dan *summits* ASEAN melalui India-ASEAN Summit pada bulan November 2002 di Phnom Penh untuk membahas pembentukan FTA yang ditargetkan akan bekerja pada tahun 2012 dan pembentukan '*Indo-ASEAN Economic Linkage Task Force*' pada pertemuan *ASEAN Economic Ministers* (AEM) dengan pertemuan reguler untuk membahas terbangunnya FTA tersebut. Pembentukan FTA tersebut turut diharapkan mampu memberikan *linkage* hubungan perdagangan terhadap perekonomian di kawasan Asia Timur (Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan), sementara pada sisi ASEAN pembentukan FTA mampu menyeimbangkan dominasi perekonomian dari kawasan Asia Timur. Di sini, dapat terlihat mengenai akar dari terbentuknya FTA yang bersifat regional antara India dan ASEAN yang menjadi akar dari dimulainya negosiasi RCEP yang dimulai pada tahun 2012.

RCEP dalam Konteks Regionalisme Asia-Pasifik

Perkembangan Regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik dapat dikatakan sebagai fenomena baru yang hanya dimulai sejak dekade

1990-an. Sebelum dekade tersebut, pola Regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik cenderung didorong oleh mekanisme pasar dengan tiga ciri-ciri utama: (1) kemampuan daya saing dalam kawasan tersebut ditentukan oleh lancarnya arus perdagangan antara kawasan Asia-Pasifik dengan kawasan (*free flow of intraregional trade* dalam apa yang disebut sebagai 'Factory Asia'); (2) pemotongan bea tarif yang dilakukan secara unilateral dan tidak terlalu bergantung pada aturan WTO terutama yang dilakukan oleh Tiongkok dan ASEAN; (3) kurangnya institusi yang mengatur Regionalisme tersebut seperti pada Uni Eropa dan aturan-aturan dari WTO (*lack of top-level management*) (Baldwin 2007).

Persaingan antara RCEP dengan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dalam memahami proses pembentukan Regionalisme perdagangan dan ekonomi di Asia-Pasifik tidak dapat dipisahkan serta perkembangan politik kuasa yang berkembang secara umum. Terdapat dua aspek utama dalam memahami mengenai keterkaitan antara RCEP dengan TPP meliputi aspek pembentukan RCEP sebagai upaya yang dilakukan oleh Tiongkok serta ASEAN untuk membendung inisiatif TPP yang pada umumnya didorong oleh kepentingan Amerika Serikat dan dari segi aspek kekhawatiran ASEAN terhadap TPP yang dianggap berpotensi untuk memecah belah negara-negara Asia Tenggara baik secara politik maupun ekonomi. Selain itu, ASEAN *Centrality* turut terlihat melalui penekanan fokus pembentukan RCEP dalam kerangka berbagai kesepakatan dalam ASEAN+1 dibandingkan dengan melalui kerangka Regionalisme baru. Selain itu, sifat negosiasi yang cenderung cair dan tidak mematok standar yang terlampau tinggi seperti halnya pada TPP turut memengaruhi kecenderungan negara-negara Asia-Pasifik dan India untuk terlibat lebih jauh dalam berbagai negosiasi RCEP. Fokus negosiasi RCEP lebih membahas mengenai tarif bea masuk barang, kerangka negosiasi tarif sesuai terhadap aturan-aturan WTO, serta membatasi ruang negosiasi pada isu-isu yang tidak sensitif (seperti investasi, pertanian dan hak kekayaan intelektual) menjadi keuntungan utama yang ditawarkan oleh RCEP pada negara-negara yang terlibat (Wilson 2015). Dalam hal ini terdapat beberapa pandangan skeptis bahwa perjanjian-perjanjian yang melibatkan ASEAN cenderung dangkal, terutama dalam isu-isu yang tidak menyangkut akses pasar terutama lingkungan dan perlindungan ketenagakerjaan (Lewis 2013).

Secara umum, terdapat tiga poin utama yang dikemukakan oleh India dalam meja perundingan RCEP yang menjadi titik pembahasan utama meliputi: (1) liberalisasi pada mayoritas arus barang dan jasa; (2) liberalisasi sektor jasa; dan (3) hak kekayaan intelektual. Kekhawatiran India atas usulan dalam perundingan RCEP untuk menghapus cukai

sebesar 92%-99% dan mendorong negara tersebut untuk memberikan penawaran pembebasan cukai melalui *three-tier system* yang mengacu pada negara-negara yang memiliki keunggulan komparatif dengan India: 42,5% untuk barang dari Tiongkok, Australia, dan Selandia Baru, 65% untuk barang dari Jepang dan Korea, dan 80% untuk barang dari ASEAN, walaupun usulan tersebut ditolak (Wignaraja 2018). Upaya India untuk memberikan penghapusan cukai antara 70% hingga 75% (dengan angka khusus bagi Tiongkok, Australia dan Selandia Baru karena tidak memiliki FTA berkaitan dengan India) sulit untuk direalisasikan akibat dorongan dari Australia dan Selandia Baru untuk memberikan akses pasar bagi produk olahan susu dan pertanian mereka. Keunggulan India dalam sektor jasa memunculkan keberatan dan penolakan dari negara-negara ASEAN, terutama dalam kemudahan pergerakan bagi para pekerja terampil asal India yang dikhawatirkan akan menetap dan menutup lapangan pekerjaan dalam negeri. Sedangkan mengenai poin hak kekayaan intelektual, tekanan dari Korea Selatan dan Jepang untuk memperketat aturan hak kekayaan intelektual atas obat-obatan dalam perundingan RCEP memunculkan kekhawatiran berkurangnya akses pasar untuk obat generik (obat-obatan yang telah habis masa patennya sehingga dapat diproduksi oleh berbagai perusahaan) serta meningkatnya harga bagi obat-obatan non-generik. Pengembangan narasi dalam negeri pada posisi India pada ketiga isu di perundingan RCEP tersebut serta proses pengambilan keputusan dalam pemerintah India akan saling memengaruhi yang menjadi pembahasan utama dalam bagian selanjutnya.

Pembahasan

Struktur Pemerintahan dan Industri di India

Meski kebijakan pembangunan India secara historis tergolong '*state-directed*', namun hubungan antara negara dan kelompok bisnis dapat dikatakan terikat dengan arah kebijakan ekonomi politik negara India. Pada era pemerintahan Nehru, kelompok bisnis mencapai kesepakatan dengan negara dalam regulasi perekonomian serta proteksi dari perdagangan internasional di tengah kebijakan pembangunan yang bersifat sosialis (Mukherji 2009). Dalam merespons kebijakan pembangunan terencana dan terpusat, kelompok-kelompok bisnis besar di India membentuk serikat *Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry* (FICCI) dan *Associated Chambers of Commerce and Industry* (Assocham) yang menyesuaikan kebijakan negara India untuk mencapai keuntungan dari izin proteksi sebelum liberalisasi pada dekade 1990-an (Kochanek 1996). Peranan FICCI dan Assocham mulai digantikan dengan *Confederation of Indian Industry* (CII) sejak tahun

1970-an, memenuhi peran dalam pembentukan kebijakan ekonomi India pada era reformasi ekonomi tahun 1990-an. Kelompok-kelompok bisnis ini memainkan peranan penting sebagai perwakilan dari kelompok pengusaha dan sektor swasta dalam kebijakan ekonomi politik India baik pada era autarki dan Proteksionisme. Secara umum, susunan dari kelompok pengusaha besar di India dapat dilihat pada tabel berikut (Hardgrave Jr. dan Kochanek 2008):

	FICCI	Assocham	CII
Tahun Berdiri	1927	1920	1992 (1895 dengan nama Engineering and Iron Trades Association –EITA)
Keanggotaan			
Korporat	1543	750	4803
Perorangan	443	125	646
Jumlah Badan Usaha yang Terwakili	250.000	150.000	95.000
Anggaran	440 juta rupee India	90 juta rupee India	1,31 miliar rupee India
Jumlah Kantor Cabang	450	90	793

Tabel 1 - Susunan Kelompok Pengusaha di India (Tahun 2003-2004)

Meskipun secara umum pelbagai pertemuan mengenai negosiasi RCEP India cenderung lebih banyak diinisiasi melalui Kementerian Perdagangan dan Industri serta lembaga pemerintahan India lainnya, keterlibatan FICCI serta CII dalam sosialisasi serta negosiasi dalam negeri mengenai RCEP menunjukkan konsolidasi yang tetap pada konglomerasi kelompok-kelompok usaha di India mengenai kebijakan perdagangan dengan pemerintahan India (Department of Commerce and Industry 2019). Keterkaitan hubungan antara industri dan pemerintah di India tersebut akan dipaparkan dalam membahas perkembangan aktor-aktor domestik dalam sikap mereka mengenai isu RCEP ini. Salah satu sektor yang dianggap strategis bagi perekonomian India yaitu dalam produksi besi dan baja yang memenuhi susunan manufaktur hingga sepertiga dari keseluruhan perekonomian India. Sejak tahun 2016, sudah ada kekhawatiran dari FICCI di India mengenai untuk menaikkan cukai impor baja dari 10% dan 15% hingga sebesar 25% akibat dari keterlibatan India dalam pelbagai

FTA yang menyebabkan membanjirnya produk-produk baja dari Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok, terutama dengan berkurangnya permintaan dari Tiongkok (The Economic Times 2016). Meski begitu, kekhawatiran mengenai masuknya produk besi dan baja dalam perjanjian RCEP juga dirasakan oleh pejabat India, terutama untuk membatasi impor hanya pada bahan baku produksi saja seperti nikel, besi mentah, batu bara dan sebagainya (Sikarwar 2018).

Sedangkan sikap dari organisasi kelompok pengusaha India lainnya, CII cenderung ambigu dan kurang konsisten dalam memberikan respons terhadap RCEP dengan kecenderungan untuk mendukung India bergabung dalam RCEP. CII memainkan peran penting dalam hubungan antara kelompok bisnis dengan pemerintah di India, terutama karena meningkatnya keterlibatan *Association of Indian Engineering Industry* (AIEI – sebelum berganti nama menjadi CII) pada masa liberalisasi perekonomian di era pemerintahan Rajiv Gandhi pada pertengahan hingga akhir dekade 1980-an (Mukherji 2009). Di satu sisi, pernyataan resmi CII menganggap bahwa mundurnya India dari perundingan RCEP dianggap dapat menghambat integrasi India dalam rantai suplai global (*Global Value Chain* (GVC)) terutama di tengah momentum perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, sehingga menghambat investasi dan *preferential access* bagi produk ekspor India untuk dapat dijual ke luar negeri (The Economic Times 2019b).

Dinamika Politik Domestik India

Naiknya Partai BJP dalam ranah perpolitikan India mendorong pergeseran yang signifikan dalam memahami dinamika politik domestik di India yang sebelumnya didominasi oleh Partai Congress sejak kemerdekaan negara tersebut. Salah satu faktor kenaikan BJP dalam perpolitikan India secara mutlak disebabkan terdapat ketidakpuasan oleh dinasti politik dalam Congress yang dikuasai oleh keluarga Nehru-Gandhi (Iwanek 2019). Meskipun nama besar keluarga tersebut sudah bukan merupakan jaminan utama bagi Congress dalam memenangkan pemilihan umum, slogan seperti 'Congress-Free India' menunjukkan bahwa aspek ideologi serta desentralisasi proses politik pada tingkat negara bagian mendorong kesimpulan bahwa dinamika domestik di India sudah tidak lagi berorientasi pada figur seperti era-era sebelumnya (Ganapathy 2017). Dengan penurunan popularitas Partai Congress India di era kontemporer dipahami mengakibatkan akses bagi elemen sayap kanan India untuk ikut serta dalam perpolitikan India secara signifikan.

Kelompok sayap kanan yang dipersepsikan sebagai garis depan perlawanan terhadap globalisasi di India berkaitan erat dengan kelompok-kelompok berbasis Hindu yang disebut sebagai *Sangh Parivar* (di dalamnya meliputi partai BJP, *Bharatiya Mazdoor Singh* – BMS, *Swadeshi Jagran Manch* – SJM dan RSS). Himpunan kelompok-kelompok sayap kanan tersebut dapat dikarakteristikan ekstrem, terutama dengan perlawanan kerasnya terhadap modal asing, gerakan Nasionalisme yang berbasis agama (*religious nationalism*), serta memandang ketidaksesuaian gagasan Neoliberalisme ekonomi di India dengan merujuk sistem kasta yang dapat membatasi hak-hak pekerja berdasarkan kasta sosial (Hensman 2010). Secara umum, pertentangan kelompok-kelompok politik sayap kanan di India bertujuan untuk melindungi kelompok petani serta industri domestik dari persaingan yang dibuka sejak liberalisasi perekonomian India, namun tidak memfokuskan pada isu-isu buruh dan pekerja dengan berlandaskan pada tatanan sosial Hindu yang hierarkis.

Kuatnya kelompok nasionalis Hindu sebagai salah satu basis dukungan utama bagi Perdana Menteri Narendra Modi dapat terlihat dalam demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah di negara-negara bagian India yang menentang keterlibatan India dalam RCEP. Pada tanggal 10 Oktober 2019, RSS melakukan demonstrasi di New Delhi selama sebelas hari yang dianggap dapat merugikan seratus juta pekerja dalam sektor pertanian dan susu di India dengan kekhawatiran tidak mampu berkompetisi dengan produsen asing (Dasgupta 2019b). Demonstrasi massal selama sepuluh hari yang dilakukan oleh SJM dan RSS menganggap bahwa RCEP merugikan daya tawar India dalam perdagangan internasional dan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar jika India secara tergesa-gesa memaksakan integrasi ekonominya ke dalam GVC (The Economic Times 2019c). Selain itu, posisi SJM dalam memandang perdagangan elektronik (*e-commerce*) cenderung merugikan pengusaha kecil dan menengah di India yang dianggap dapat mendorong masuknya barang bebas cukai, terutama dari Tiongkok dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat melalui Jepang, seperti yang dituturkan oleh salah satu petinggi RSS, Ashwani Mahajan (Agarwal 2017).

Akan tetapi, tekanan domestik mengenai isu RCEP di India tidak hanya melalui kuatnya kelompok nasionalis Hindu saja, sektor pertanian dan peternakan (terutama industri susu) juga menjadi salah satu sektor perekonomian domestik yang mengkhawatirkan bergabungnya India di dalam RCEP. Salah satu organisasi masyarakat yang menentang keras keterlibatan India dalam perjanjian RCEP ialah *Karnataka Rajya Raitha*

Sangha (KRRS), serikat petani terbesar di India yang umumnya berbasis di wilayah India Selatan. Pada bulan April 2017, K. T. Gangdhar sebagai ketua dari KRSS menyatakan bahwa bergabungnya India dalam RCEP akan semakin memperparah dampak bagi petani dalam negeri terutama pada sektor kelapa sawit, teh dan lada setelah bergabungnya India dalam FTA antara ASEAN dengan Sri Lanka. Dalam pernyataan tersebut, terdapat pula kritik mengenai ketentuan hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam rancangan RCEP yang dianggap merugikan dan menghambat petani untuk mengembangkan variasi jenis bijih yang berakibat pada petani untuk terpaksa membeli bibit dari korporasi besar yang berbiaya tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam bocoran dokumen mengenai negosiasi hak kekayaan intelektual dalam RCEP yang dianggap memberikan keuntungan signifikan terhadap perusahaan-perusahaan dari negara-negara maju (Chander dan Sunder 2018). Kelompok *All-India Kisan Sangharsh Coordination Committee* (AIKSCC) turut menganggap bahwa RCEP akan mencabut seluruh hak petani dalam kendali biji-biji pertanian serta menganggap seluruh proses perundingan yang dianggap tidak demokratis, transparan, serta hanya menguntungkan korporasi besar terutama menyangkut hak kekayaan intelektual dalam industri farmasi dan keamanan data digital (Jitendra 2017). Sebagai salah satu serikat utama di India yang menaungi lebih dari 250 organisasi pertanian dan peternakan di India, AIKSCC bersama dengan sayap pemuda dari partai Congress melakukan demonstrasi dalam menentang bergabungnya India dalam RCEP (The Hindu 2019).

Kekhawatiran terbesar yang dirasakan oleh serikat pekerja dan petani di India pada negosiasi RCEP yaitu tidak transparannya pemerintah terhadap publik mengenai butir-butir cakupan dalam pembahasan RCEP. Ditunjukkan dengan tindakan oleh perwakilan dari Serikat *Bharatiya Kisan* (BKU), Serikat Petani Tamil Nadu (TNFA), dan Komite Koordinasi Gerakan Petani India Selatan (SICCFM) kepada Menteri Perdagangan dan Industri India, Shri Piyush Goyal pada tanggal 31 Juli 2019, dengan melayangkan surat resmi secara bersama. Mereka menganggap bahwa tidak transparannya pemerintah dalam negosiasi RCEP melingkupi: (1) tidak dikeluarkannya teks resmi mengenai RCEP kepada publik untuk pembahasan lebih; (2) perundingan pemerintah yang hanya melibatkan kelompok-kelompok industri besar; (3) kekhawatiran terhadap hak kekayaan intelektual atas kepemilikan varietas benih-benih pertanian; dan (4) ancaman terhadap industri susu di India (*Indian farmers concern on the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 2019*). Secara ringkas, tuntutan-tuntutan dari serikat-serikat tersebut ialah sebagai berikut: (1) melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap segala perjanjian FTA yang

melibatkan India baik melalui parlemen maupun pada publik termasuk transparansi dalam segala proses perundingan dalam RCEP; (2) menerapkan pengecualian pada sektor-sektor publik serta menolak keterlibatan sektor pertanian dan peternakan dalam perjanjian perdagangan yang menyangkut hak kekayaan intelektual dalam sektor-sektor perekonomian; dan (3) menghentikan hak-hak investor dan perusahaan untuk dapat menuntut pemerintah yang dapat merugikan masyarakat luas serta lingkungan hidup secara umum.

Sikap penolakan terhadap pemerintah India untuk melanjutkan negosiasi dalam RCEP turut muncul secara sistemik dari Partai Komunis Marxis India (CPI(M)) yang mencerminkan posisi Nasionalisme dalam sikap organisasinya. Meskipun hanya memiliki suara kecil baik dalam majelis rendah maupun tinggi di parlemen India, partai tersebut menguasai suara mayoritas pada negara bagian Kerala di India Selatan (Jaffe dan Doshi 2017). Dalam pernyataan resminya, mereka mengambil posisi yang serupa dengan sikap dari serikat-serikat petani yang secara keras menentang keterlibatan India dalam RCEP hingga menyatakan solidaritas terhadap kelompok-kelompok petani (*Communist Party of India (Marxist) 2019*). Sayap gerakan petani dari CPI(M), *All-India Kishan Sabha*, menggelar aksi protes pada tanggal 24 hingga 25 Oktober 2019, maupun pada 4 November 2019 seperti yang dilakukan oleh serikat AIKSCC serta sayap pemuda partai Congress (Pal 2019). Secara umum, penggolongan aktor-aktor domestik dalam penolakan keterlibatan India dalam RCEP dapat dimasukkan melalui tabel berikut di bawah ini:

	Sifat	Aktor Utama
Sistem Politik	(Dalam ranah ekonomi politik) Terpusat namun mulai terdesentralisasi sejak periode liberalisasi pada dekade 1990-an	Kementerian Industri dan Perdagangan (dalam kasus RCEP)
Kelompok Masyarakat		
Partai Politik	Cenderung terbelah antara kepentingan pemerintah dan tekanan masyarakat	<i>Partai Bharatiya Janata (BJP), Partai Indian National Congress (INC – Congress), Partai Komunis India (CPI(M))</i>
Serikat Pekerja dan Petani	Cenderung kuat dengan memiliki jejaring yang kuat untuk mampu menekan pemerintah melalui serangkaian aksi protes (dengan beberapa catatan): <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh kelompok-kelompok nasionalis Hindu dalam partai BJP (terutama secara ideologis dan sebagai basis dukungan partai), • Kekhawatiran akan defisit neraca perdagangan yang dirasakan baik oleh pemerintah maupun para pelaku perekonomian 	<i>Bharatiya Kisan Sangh (BKS), Karnataka Rajya Raitha Sangha (KRRS), All-India Kisan Sangharsh Coordination Committee (AIKSCC), Indian Coordination Committee of Farmers' Movements (ICCFM), Bharatiya Kisan Union (BKU), Tamil Nadu Farmers Association (TNFA), South India Coordination Committee of Farmers Movements (SICCFM)</i>
Kelompok Industri	Cenderung terbatas; memiliki akses dalam pemerintahan namun tidak selalu menentukan kebijakan akhir pemerintah (terutama terhadap kepentingan serikat-serikat tani yang memiliki hubungan terhadap partai politik)	<i>Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), Confederation of Indian Industry (CII)</i>
Policy Network	<i>Democratic corporatism</i> – dengan kuatnya peran jejaring kelompok-kelompok petani serta nasionalis Hindu sebagai penekan secara tidak langsung dalam mundurnya India dari perundingan RCEP	<i>Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)</i> beserta organisasi-organisasi <i>sangh</i> bawahan lainnya sebagai induk ideologis dari partai BJP

Tabel 2 - Klasifikasi Aktor-Aktor dalam Dinamika Keluarnya India dari RCEP
(Sumber: Diolah oleh Penulis)

Berdasarkan analisis dalam subbab-subbab sebelumnya serta dalam tabel ini, terdapat dua poin utama yang dapat ditarik, yakni menguatnya kelompok nasionalis Hindu dalam perpolitikan India dan terbentuknya persekutuan antara kelompok oposisi politik dengan pelbagai serikat petani yang secara kritis menentang keterlibatan India dalam RCEP. Namun, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain terutama dengan ketidakpuasan RSS sebagai kelompok nasionalis Hindu utama terhadap partai BJP, yang mana berkaitan erat dengan RSS, yang mencoba untuk menyuarakan kepentingan kelompok-kelompok yang berpeluang terdampak dalam sektor terkait dalam RCEP, terutama sektor pertanian dan peternakan. Dalam hal ini, RSS sebagai induk ideologis dari partai BJP memainkan peranan aktif sebagai kelompok penekan terhadap pemerintah dari partai BJP yang mencirikan karakteristik penyusunan kebijakan luar negeri India yang bersifat korporatist. Sedangkan kepentingan kelompok bisnis cenderung terbelah terutama dengan persaingan antara FICCI dan CII, yang dapat dilihat mengukuhkan kembali kepentingan Proteksionisme ekonomi di India meskipun liberalisasi telah diluncurkan sejak dekade 1990-an.

Tabel di bawah ini akan mencoba untuk menggolongkan pelbagai posisi dari aktor-aktor yang terkait dalam penelitian ini mengenai keterlibatan India dalam RCEP:

Penggolongan Aktor Utama	Anti-RCEP	Pro-RCEP
Partai Politik	Partai Congress (setelah terpilihnya Narendra Modi sebagai perdana menteri), CPI(M)	Partai Congress (pada masa dimulainya keterlibatan India dalam perundingan RCEP sebagai partai pemerintah), Partai BJP
S e r i k a t Pekerja dan Petani	Organisasi <i>Sangh</i> (implikasi keterhubungan dengan gerakan nasionalis Hindu) meliputi: <i>Bharatiya Kisan Sangh</i> (BKS), <i>Karnataka Rajya Raitha Sangha</i> (KRRS), <i>Bharatiya Kisan Union</i> (BKU) <i>Tamil Nadu Farmers Association</i> (TNFA), <i>South India Coordination Committee of Farmers Movements</i> (SICCFM), <i>All-India Kisan Sangharsh Coordination Committee</i> (AIKSCC), <i>Indian Coordination Committee of Farmers' Movements</i> (ICCFM)	-
Kelompok Industri	<i>Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry</i> (FICCI)	<i>Confederation of Indian Industry</i> (CII) (dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang industri India)

Tabel 3 - Penggolongan Posisi Aktor-Aktor Domestik Mengenai Keterlibatan Pemerintahan India dalam RCEP

(Sumber: Diolah oleh Penulis)

Kesimpulan

Tulisan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai dinamika domestik dalam mundurnya India dari negosiasi RCEP yang dianggap menyimpang dari visi India untuk mendekatkan negaranya pada kawasan Asia-Pasifik, termasuk dalam ranah ekonomi. Meskipun secara umum India memiliki perkembangan kerja sama yang positif terhadap negara-negara di kawasan Asia Timur baik secara bilateral maupun multilateral, tetapi mundurnya India sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam perjanjian RCEP menimbulkan pertanyaan akan aktor-aktor yang memengaruhi India dalam pengambilan keputusan tersebut. Secara umum, tulisan ini telah mencoba untuk menunjukkan bahwa terdapat tekanan dari kelompok bisnis untuk mengkaji ulang perjanjian RCEP dalam sektor industri yang telah memiliki hubungan dan pengaruh dalam birokrasi pemerintahan India, seperti FICCI dan industri baja. Akan tetapi terdapat pula kelompok bisnis India seperti CII yang menyayangkan mundurnya India dari RCEP yang dianggap dapat menghambat integrasi dan keterlibatan India dalam GVC.

Selain itu, fenomena mundurnya India dari RCEP menunjukkan karakteristik *policy network* dalam negeri India yang bersifat *democratic corporatism* dengan kuatnya kelompok masyarakat dalam memengaruhi kebijakan luar negeri India di samping peran kementerian, terutama dalam konteks Kementerian Industri dan Perdagangan India terhadap isu RCEP, yang kuat. Salah satu aktor yang penting pada pembentukan narasi Proteksionisme terkait RCEP ialah kelompok nasionalis Hindu. Kelompok sayap kanan India, secara spesifik organisasi ideologis RSS, sebagai basis massa dari partai BJP yang berkuasa berpengaruh kuat terhadap keputusan India untuk mundur dari perundingan RCEP. Dapat dikatakan bahwa RSS, beserta organisasi-organisasi bawahannya seperti SJM dan BKS, memiliki kuasa yang mampu menggalang dukungan suara-suara pelaku industri kecil serta pertanian untuk menekan pemerintah India supaya tidak terlibat dalam perjanjian RCEP.

Daftar Pustaka

Buku dan Bagian dalam Buku

- Bryman, A., 2004. *Social Research Methods*. Oxford: Oxford University Press.
- Hardgrave Jr., R. L., dan Stanley A. Kochanek, 2008. *India: Government and Politics in a Developing Nation, Seventh Edition*. Boston: Thomson Wadsworth.
- Hensman, R., 2010. "Labour and Globalization: Union Responses in India", dalam Bowles, Paul, dan John Harriss (eds.), 2010. *Globalization and Labour in China and India*. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Artikel Jurnal

- Chander, A., dan Madhavi Sunder, 2018. "The Battle to Define Asia's Intellectual Property Law: From TPP to RCEP", *UC Irvine Law Review*, **8** (331):331-60.
- Kochanek, S. A., 1996. "Liberalisation and business lobbying in India", *The Journal of Commonwealth & Comparative Politics*, **34** (3):155-73.
- Koo, M. G., 2012. "Same Bed, Different Dreams: Prospects and Challenges for ASEAN+'X' Forums", *Journal of International and Area Studies*, **19** (1):79-96.
- Lewis, M. K., 2013. "The TPP and the RCEP (ASEAN+6) as Potential Paths Toward Deeper Asian Economic Integration", *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy*, **8** (359):359-78.
- Mukherji, R., 2009. "The State, Economic Growth, and Development in India", *India Review*, **8** (1):81-106.
- Risse-Kappen, T., 1991. "Public Opinion, Domestic Structure, and Foreign Policy in Liberal Democracies", *World Politics*, **43** (4):479-512.
- Sridharan, K., 1997. "India and Southeast Asia in the 1990s", *Southeast Asian Affairs* 1997.
- Wilson, J. D., 2015. "Mega-Regional Trade Deals in the Asia-Pacific: Choosing Between the TPP and RCEP?", *Journal of Contemporary Asia*, **45** (2):345-53.

Working Paper

- Aiyar, S. S. A., 2016. “Twenty-Five Years of Indian Economic Reform”, Cato Institute – Policy Analysis, No. 803, 26 Oktober.
- Baldwin, R. E., 2007. “Managing the Noodle Bowl: The Fragility of East Asian Regionalism”, ADB Working Paper Series, No. 7, Februari 2007.
- Wignaraja, G., 2018. “What does RCEP mean for insiders and outsiders? The experience of India and Sri Lanka”, ARTNeT Working Paper Series, No. 181, Juli 2018.

Publikasi Daring

- Agarwal, M., 2017. “SJM Urges Indian Government to Deny Any Pact On Ecommerce” [daring]. Tersedia dalam [<https://inc42.com/buzz/sjm-rcep-negotiations-ecommerce-government>] (diakses pada [29 Juli 2020]).
- Bhadrakumar, M. K., 2019. “With RCEP, Act East policy is at the crossroads” [daring]. Tersedia dalam [<https://www.tribuneindia.com/news/archive/with-rcep-act-east-policy-is-at-the-crossroads-859170>] (diakses pada [29 Juli 2020]).
- Communist Party of India (Marxist), 2019. “Don’t proceed with RCEP” [daring]. Tersedia dalam [<https://cpim.org/pressbriefs/dont-proceed-rcep>] (diakses pada [29 Juli 2020]).
- Dasgupta, D., 2019a. “Congress leader Sonia Gandhi steers opposition to RCEP trade pact in India” [daring]. Tersedia dalam [<https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/congress-leader-sonia-gandhi-steers-opposition-to-rcep-trade-pact-in-india>] (diakses pada [29 Juli 2020]).
- _____, 2019b. “Influential group in India launches nationwide protest against RCEP free trade pact” [daring]. Tersedia dalam [<https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/influential-group-in-india-launches-nationwide-protest-against-rcep-free-trade-pact>] (diakses pada [29 Juli 2020]).
- Department of Commerce and Industry, 2019. “List of RCEP Stakeholders Consultation” [daring]. Tersedia dalam [https://commerce.gov.in/writereaddata/uploadedfile/NTESCL637038869992814245_List_RCEP_stakeholders_consultation_23-08-2019-Hindi.pdf] (diakses pada 29 Juli 2020)).

- Ganapathy, N., 2017. "Nehru-Gandhi family: A dynasty in decline" [daring]. Tersedia dalam [<https://www.straitstimes.com/asia/a-dynasty-in-decline>] (diakses [pada 29 Juli 2020]).
- Iwanek, K., 2019. "The End of India's Nehru-Gandhi Dynasty?" [daring]. Tersedia dalam [<https://thediplomat.com/2019/07/the-end-of-indias-nehru-gandhi-dynasty>] (diakses pada [29 Juli 2020]).
- Jaffe, G., dan Vidhi Doshi, 2017. "One of the few places where a communist can still dream," [daring]. Tersedia dalam [https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/the-place-where-communists-can-still-dream/2017/10/26/55747cbe-9c98-11e7-b2a7-bc70b6f98089_story.html] (diakses pada [29 Juli 2020]).
- Jitendra, 2017. "Proposed RCEP trade deal anti-poor, compromises India's food sovereignty: protesters" [daring]. Tersedia dalam [<https://www.downtoearth.org.in/news/economy/proposed-rcep-trade-deal-anti-poor-public-must-be-consulted-people-s-organisations-58336>] (diakses pada [29 Juli 2020]).
- Mishra, M. K., 2019. "India's piecemeal Act East policy" [daring]. Tersedia dalam [<https://www.asiatimes.com/2019/11/opinion/indias-piecemeal-act-east-policy>] (diakses pada [29 Juli 2020]).
- Pal, S., 2019. "AIKS to Hold Nationwide Protests Against RCEP on Nov 4" [daring]. Tersedia dalam [<https://www.newslick.in/AIKS-Protest-Against-RCEP-Narendra-Modi-Government>] (diakses pada [29 Juli 2020]).
- Sharma, S.N., 2019. "What is stopping India from joining RCEP trade deal?" [daring]. Tersedia dalam [<https://economictimes.india-times.com/news/economy/foreign-trade/what-is-stopping-india-from-joining-rcep-trade-deal/articleshow/67399881.cms>] (diakses pada [29 Juli 2020]).
- Sikarwar, D., 2018. "Steel ministry against inclusion of finished products in RCEP" [daring]. Tersedia dalam [<https://economictimes.india-times.com/news/economy/policy/steel-ministry-against-inclusion-of-finished-products-in-rcep/articleshow/65481392.cms?from=mdr>] (diakses pada [29 Juli 2020]).
- The Economic Times, 2016. "Budget 2016: Raise import duty on steel to 25%, says Ficci" [daring]. Tersedia dalam [<https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/budget-2016-raise-import-duty-on-steel-to-25-says-ficci/articleshow/51090093.cms>]

(diakses pada [29 Juli 2020]).

_____, 2019a. “India decides to opt out of RCEP, says key concerns not addressed” [daring]. Tersedia dalam [<https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-decides-to-opt-out-of-rcep-says-key-concerns-not-addressed/article-show/71896848.cms>] (diakses pada [29 Juli 2020]).

_____, 2019b. “Not being part of RCEP will harm India’s exports and investment flow, says CII” [daring]. Tersedia dalam [<https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/not-being-part-of-rcep-will-harm-indias-exports-and-investment-flow-says-cii/articleshow/71876218.cms>] (diakses pada [29 Juli 2020]).

_____, 2019c. “SJM to hold nationwide protests from October 10-20 against RCEP” [daring]. Tersedia dalam [<https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/sjm-to-hold-nationwide-protests-from-october-10-20-against-rcep/article-show/71517485.cms>] (diakses pada 29 Juli 2020)].

The Hindu, 2019. “CII backs signing of RCEP, farmers up against it” [daring]. Tersedia dalam [<https://www.thehindu.com/news/national/cii-backs-signing-of-rcep-farmers-up-against-it/article29872134.ece>] (diakses [pada 29 Juli 2020]).

The Nation Thailand, 2011. “Can Asean centrality be maintained at East Asia Summit?” [daring]. Tersedia dalam [<https://www.nationthailand.com/opinion/30169339>] (diakses pada [29 Juli 2020]).

Lain-lain

Indian farmers concern on the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), 2019. New Delhi: Indian Coordination Committee of Farmers Movements. [PDF] Tersedia dalam [<https://via-campesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/Memorandum-to-Commerce-Ministry.pdf>] (diakses pada [29 Juli 2020]).